

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *ESG* (*Environmental, Social, Governance*) adalah kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk menilai dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan (seperti perubahan iklim), aspek sosial (seperti hak pekerja), dan tata kelola perusahaan (seperti transparansi kebijakan), guna mendorong praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab (UNPRI, 2006). *ESG* menjadi alat evaluasi bagi investor dan pemangku kepentingan untuk mengukur risiko dan peluang non-finansial yang memengaruhi keberlanjutan jangka panjang suatu entitas (GRI, 2021). Isu *ESG* telah menjadi sorotan utama dalam praktik bisnis global selama satu dekade terakhir. Sejak 2010, tekanan dari investor institusional, konsumen, dan regulator mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi inti (Eccles & Serafeim, 2014; Gillan et al., 2021). Meta-analisis Friede et al. (2015) terhadap 2.000+ studi empiris menunjukkan bahwa *ESG* tidak hanya relevan di negara maju, tetapi juga semakin kritis di pasar berkembang seperti Asia Tenggara. Pergeseran ini diperkuat oleh pertumbuhan signifikan *signatory Principles for Responsible Investment* (PRI) yang mencapai 5.000+ institusi dengan total aset USD 121 triliun pada 2022 (PRI, 2022).

Lembaga pengatur global dan regional semakin gencar mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik *ESG* yang transparan dan bertanggung jawab. Di Uni Eropa, regulasi seperti *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR) mewajibkan pelaporan risiko lingkungan dan sosial sebagai syarat operasional (Scholtens, 2021). Studi oleh Ho & Park (2022) di China membuktikan bahwa tekanan regulasi meningkatkan transparansi *ESG* hingga 40%, sekaligus

mendorong inovasi hijau. Laporan OECD (2020), juga menegaskan bahwa 70% negara anggota OECD telah menjadikan pelaporan *ESG* sebagai kewajiban hukum, tren yang mulai diikuti oleh negara berkembang seperti di ASEAN melalui forum ACMF. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand menunjukkan pertumbuhan pesat dalam investasi yang mempertimbangkan faktor *ESG*. Menurut laporan *Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 2020*, investasi berkelanjutan di Asia mencapai USD 12 triliun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 15% (GSIA, 2020). Namun, kontroversi terkait praktik *ESG* di berbagai perusahaan publik sering kali memicu perdebatan tentang dampaknya terhadap nilai perusahaan dan pendapatan.

Perusahaan-perusahaan publik menghadapi di Asia Tenggara menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan praktik *ESG*. Secara demografis, keragaman kondisi sosial-ekonomi dan budaya antarnegara menciptakan kompleksitas tersendiri. Sebagai contoh, perusahaan di Indonesia dan Malaysia diwajibkan melapor terkait *ESG*, sementara Kamboja dan Laos belum memiliki kerangka regulasi yang memadai (Nguyen & Nguyen, 2021). Di sisi lain, budaya paternalistik (kontrol yang kuat dari pemimpin menyebabkan keterbatasan kebebasan dalam pengambilan keputusan) yang kuat di Filipina dan Indonesia seringkali bertentangan dengan prinsip tata kelola modern (Park & Kim, 2020). Tantangan ini diperparah oleh ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, seperti kelapa sawit dan pertambangan, yang rentan terhadap kontroversi lingkungan (Hooy & Ali, 2023). Namun, di tengah kompleksitas tersebut, kesadaran pemangku kepentingan global dan lokal terus mendorong transparansi. Investor asing seperti BlackRock dan GPIF Jepang menekan perusahaan ASEAN untuk meningkatkan kualitas pelaporan *ESG*, yang berdampak pada peningkatan alokasi anggaran ESG hingga 60% di Indonesia dan Filipina (Tran & Nguyen, 2022). Lembaga pengatur seperti OJK

dan Securities Commission Malaysia juga memperkuat kerangka kebijakan untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab (ASEAN CSR Network, 2021).

Konsep Kontroversi *ESG* merujuk pada insiden atau isu negatif terkait suatu perusahaan yang memicu kritik publik, risiko reputasi, atau penurunan kepercayaan pemangku kepentingan, seperti polusi, pelanggaran hak pekerja, atau skandal korupsi (He & Harris, 2020). Kontroversi *ESG* secara signifikan menurunkan nilai perusahaan melalui reaksi negatif pasar saham, seperti yang dialami PT. Adaro Energy yang kehilangan 8% nilai saham dalam sepekan pasca konflik lahan dengan masyarakat lokal, karena investor menghindari risiko reputasi (Utami et al., 2020). Sementara itu, kontroversi *ESG* juga mengurangi pendapatan perusahaan melalui kehilangan kepercayaan konsumen dan sanksi bisnis, contohnya Wilmar International mengalami penurunan pendapatan \$200 juta setelah tuduhan deforestasi menyebabkan pembatalan kontrak oleh perusahaan multinasional (He & Harris, 2020). Mekanisme penurunan nilai perusahaan dipicu oleh divestasi investor institusional yang sensitif terhadap isu lingkungan, sedangkan penurunan pendapatan muncul dari boikot konsumen dan penghentian kerja sama bisnis (Amel-Zadeh & Serafeim, 2018). Kontroversi *ESG* tidak hanya merusak reputasi tetapi juga menggerus stabilitas finansial perusahaan di kawasan ini, sebagaimana terlihat pada kasus tambang di Filipina dan sektor agrikultur di Malaysia (Jo & Na, 2012).

Salah satu contoh dampak kontroversi *ESG* terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada kasus PT. Freeport Indonesia yang terlibat konflik dengan masyarakat lokal terkait limbah tambang dan pelanggaran hak adat menyebabkan tuntutan hukum, penangguhan operasional serta penurunan reputasi yang berdampak pada penurunan harga saham (Siregar et al., 2023). Studi oleh Utami et al. (2020) menemukan bahwa konflik sosial-lingkungan seperti ini tidak hanya merusak hubungan dengan komunitas lokal, tetapi juga berpotensi menurunkan nilai pasar

perusahaan melalui penurunan harga saham. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tekanan dari investor institusional yang mengadopsi prinsip *ESG* secara agresif dapat menarik dana keluar (divestasi) dari perusahaan yang dianggap berisiko tinggi secara reputasi. Hal ini sejalan dengan temuan Jo & Na (2012) yang membuktikan bahwa pelanggaran lingkungan berkorelasi negatif dengan nilai perusahaan (*firm value*) di pasar modal Asia, termasuk Indonesia. Lebih lanjut, Amel-Zadeh & Serafeim (2018), menegaskan bahwa investor global semakin memprioritaskan faktor *ESG* dalam alokasi portofolio, sehingga kontroversi lingkungan dapat mengurangi likuiditas saham dan meningkatkan biaya modal perusahaan (*cost of capital*).

Data dari Bloomberg (2021), menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kontroversi *ESG* mengalami penurunan nilai pasar rata-rata sebesar 5% setelah pengumuman terkait kontroversi tersebut. Investigasi *Human Rights Watch* (2018), mengungkap bahwa migran dari Myanmar dan Kamboja dipaksa bekerja 18–20 jam per hari di kapal ikan dengan upah di bawah standar, sementara dokumen identitas mereka disita. Laporan ILO (2015) mencatat bahwa 17% pekerja di sektor ini mengalami kerja paksa, didorong oleh lemahnya penegakan hukum dan korupsi di tingkat lokal. Skandal ini tidak hanya mencerminkan praktik bisnis tidak beretika, tetapi juga berdampak global, seperti dikeluarkannya ‘*yellow card*’ oleh Uni Eropa terhadap impor produk perikanan Thailand (Marschke & Vandergeest, 2016). Meskipun pemerintah Thailand merevisi UU Perikanan pada 2015, implementasinya tetap lemah karena kompleksitas rantai pasok yang melibatkan subkontraktor ilegal (Stringer et al., 2016).

Kontroversi yang muncul seputar *ESG* cenderung menghasilkan pemberitaan negatif dan menciptakan persepsi merugikan terhadap perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi nilai perusahaan. Studi Nguyen & Phan (2020) di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kontroversi *ESG* mengurangi *Tobin's Q* hingga 15%, terutama ketika media internasional seperti Reuters atau

Bloomberg memberitakannya secara intensif (Cheng & Chang, 2023). Nilai perusahaan yang rendah mencerminkan pandangan pasar yang pesimis terhadap prospek jangka panjang, terutama karena tingginya risiko reputasi. Sebagai contoh, perusahaan dengan kontroversi berulang kehilangan 15-20% nilai pasar dalam 6 bulan pasca-skandal, seperti ditemukan dalam penelitian Yoon et al. (2018). Di pasar berkembang dengan regulasi lemah seperti Filipina, efek ini semakin diperparah oleh asimetri informasi yang membuat investor enggan menanamkan modal (Albarrak et al., 2019).

Faurea, Nysa & Tarazia (2024), yang mengungkapkan bahwasanya di Amerika Serikat *ESG controversies* berpengaruh negatif signifikan terhadap *firm value*, disamping itu He & Harris (2020), menemukan bahwa *ESG controversies* berpengaruh negatif signifikan terhadap *corporate revenue*. Temuan ini didukung oleh riset Elamer & Boulhaga (2024), bahwasanya di Eropa juga terdapat pengaruh negatif signifikan dari *ESG controversies* terhadap *corporat performance*. Kontroversi *ESG* seperti konflik lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat telah menurunkan nilai saham perusahaan tambang di Indonesia (Utami et al., 2020). Maka dari itu berlandaskan beberapa penelitian terdahulu peneliti ada celah penelitian untuk memfokuskan perhatian peneliti di Asia Tenggara karena memiliki keunikan karena perbedaan ekonomi (misalnya Singapura yang maju vs. Indonesia dan Filipina yang masih berkembang) serta masalah sosial-lingkungan seperti deforestasi (penggundulan hutan oleh manusia) dan ketimpangan. Penelitian ini meneliti bagaimana kontroversi *ESG* memengaruhi pandangan investor dan konsumen di Asia Tenggara, yang aturan *ESG*-nya belum selengkap Eropa atau Amerika Utara. Tidak hanya demikian, penelitian terdahulu cenderung fokus pada kontroversi *ESG* di negara maju atau sektor tertentu, sehingga belum menguji secara komprehensif terhadap nilai dan pendapatan perusahaan di Asia Tenggara yang memiliki dinamika pasar dan regulasi

unik (Amel-Zadeh & Serafeim, 2018; Jo & Na, 2012). Tidak hanya itu, regulasi *ESG* di Asia Tenggara tidak seragam: Malaysia dan Thailand sudah memiliki panduan *ESG* resmi, sementara negara lain masih tertinggal. Perbedaan ini menyebabkan dampak skandal *ESG* terhadap nilai perusahaan bervariasi antarnegara (Nguyen et al., 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Kontroversi Environmental, Social, dan Governance (*ESG*) semakin menjadi sorotan global, namun dampaknya terhadap nilai perusahaan dan kinerja pendapatan di kawasan Asia Tenggara belum sepenuhnya terpetakan, terutama dalam konteks dinamika ekonomi, regulasi, dan budaya yang unik di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan menguji sejauh mana kontroversi *ESG* memengaruhi stabilitas finansial dan reputasi korporasi di Asia Tenggara selama periode 2019–2023, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti respons pasar, kebijakan pemerintah, serta kesadaran masyarakat akan isu keberlanjutan.

1. Apakah *ESG Controversies* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *ESG Controversies* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *ESG Controversies* terhadap nilai perusahaan?
2. Mengetahui pengaruh *ESG Controversies* terhadap pendapatan perusahaan?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada mengenai hubungan antara praktik *ESG* dan kinerja perusahaan. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak positif dari praktik *ESG*, penelitian ini akan fokus pada aspek kontroversi *ESG* dan dampaknya terhadap nilai perusahaan dan pendapatan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan ini, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademis tentang bagaimana kontroversi *ESG* dapat memengaruhi keputusan investasi dan persepsi pasar terhadap perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang topik *ESG* di Asia Tenggara. Dengan memberikan data dan analisis yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong studi lebih lanjut mengenai dampak *ESG* pada sektor-sektor lain, seperti keuangan, energi, dan manufaktur. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori-teori baru yang mengkaji interaksi antara aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks bisnis yang lebih luas.

1.4.1 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan publik di Asia Tenggara. Dengan memahami pengaruh kontroversi *ESG* terhadap nilai

perusahaan dan pendapatan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola risiko yang terkait dengan isu-isu *ESG*. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya investor yang mempertimbangkan faktor *ESG* dalam keputusan investasi mereka. Dengan menerapkan praktik *ESG* yang baik, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi mereka tetapi juga menarik lebih banyak investasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif terkait dengan praktik *ESG*. Dengan memahami dampak dari kontroversi *ESG* terhadap perusahaan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab. Ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan di kawasan.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN Bagian ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIS Bagian ini akan menjelaskan teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil penelitian sebelumnya, dan arah dalam pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bagian ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan sumber pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, metode analisis data dan prosedur pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bagian ini akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis dan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP Bagian ini meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

